

**STRATEGI KADER PARTAI POLITIK DALAM PENDIDIKAN POLITIK BAGI
MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF KETRAMPILAN
KEWARGANEGARAAN
(Studi terhadap kader Partai Golkar Kabupaten Sragen)¹**

Oleh:

Irawan Septiawan, Winarno & Wijianto²

ABSTRACT

The aims of the research are to determine: (1) The political education strategies that is applied by Golkar cadres of Sragen in giving political education to Sragen people (2) Whether the political education conducted by Golkar cadres of Sragen is doing well, in terms of civic skill owned by the society. Based on the result of this research, it can be concluded that (1) Political education strategies which are applied by Golkar cadres as an effort to raise public awareness about politics, consist of: a) a training for Golkar cadres to increase their knowledge about politics; b) teaching political education for society through various activities of Golkar; c) putting the political education through wings party activity and Golkar organization; d) using election campaign agenda for the implementation of political education and Golkar political campaigns; e) teaching political education with personal approach; f) forming the RT stage cadres to teach political education for the society surroundings the cadres. (2) Political education which is applied by Golkar cadres has not been able to establish a good political understanding of the society. The strategies which are applied have not given much help to increase the society political understanding. People who live in Sragen have not fulfilled the citizenship aspect viewed from the civic skill perspective and Sragen society still tend to apply patro-client political culture. The people are still being submissive to the society leaders orders, and have not been able to improve their own political thinking. This relates to the civic skill that must be owned by the citizens, which is divided into intelectual skill dan participatory skill.

Key terms: Cadres, Political Education, Civic Skill, Political Culture

¹Artikel Penelitian

² Program Studi PPKn FKIP UNS Surakarta

PENDAHULUAN

Pendidikan politik merupakan tuntutan dari perkembangan demokrasi yang saat ini berkembang diberbagai negara termasuk di Indonesia. Melalui pendidikan politik inilah masa depan politik suatu negara dapat dilihat keberhasilannya. Pendidikan politik harus dijadikan program dan sebagai salah satu kebijakan yang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Mengingat, dengan pemahaman politik yang baik warga negara dan generasi pemimpin suatu negara dapat dijadikan suatu modal awal terciptanya sistem politik suatu negara yang baik. Menurut Kartini Kartono (1989: 14) "Pendidikan politik adalah upaya yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara moral atau etis dalam mencapai tujuan politik". Pendidikan politik menjadi kewajiban dari partai politik sebagai salah satu agen pendidikan politik.

Partai politik memiliki kewajiban dan fungsi melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat. Hal tersebut seperti tertuang pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Dalam Pasal 11 ayat (1) huruf (a) menyebutkan bahwa partai politik

berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warganegara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam Pasal 13 huruf (e) partai politik juga memiliki kewajiban untuk melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya. Dengan dasar inilah partai politik harus menjadi salah satu agen pendidikan politik yang mengajarkan pendidikan politik kepada masyarakat. Peran partai politik dalam menyelenggarakan pendidikan politik tersebut dilaksanakan oleh kader-kader partai.

Kader partai politik adalah ujung tombak pelaksanaan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh masing-masing partai. Freddy K. Kalidjernih memberikan definisi kader adalah seorang atau sekelompok orang (elit) dari suatu partai dengan ciri khas, yakni berkomitmen ideologis dan berdisiplin kepada partainya (2010: 75). Kader partai politik memiliki kewajiban dan tugas untuk membantu masyarakat dalam memecahkan permasalahan politik. Semua kader partai politik memiliki tugas yang sama yaitu mengajarkan pendidikan politik kepada masyarakat. Tidak terlebihi kader-kader yang dimiliki oleh Partai Golkar.

Partai Golkar sebagai salah satu partai besar yang ada di Indonesia memiliki basis kader dan simpatisan yang cukup banyak. Kader-kader tersebut tersebar hingga tingkat desa dan menjadi salah satu bagian dari sistem politik di Indonesia. Dengan basis masa yang cukup besar inilah diharapkan Partai Golkar mampu membentuk karakter masyarakat yang memenuhi aspek-aspek kewarganegaraan. Masyarakat yang memenuhi aspek-aspek tersebut akan mampu berpartisipasi dan bersama-sama menjalankan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Tetapi saat ini pelaksanaan pendidikan politik yang diterapkan belum mampu memberikan perubahan pemahaman politik masyarakat. Kecenderungan budaya politik *patro-client* masih banyak ditemui diberbagai kelompok masyarakat. Tidak terkecuali masyarakat yang tinggal di wilayah Kabupaten Sragen.

Masyarakat di wilayah Kabupaten Sragen merupakan masyarakat dengan kultur budaya yang masih kuat. Sehingga diperlukan pendidikan politik yang baik oleh berbagai pihak, termasuk pendidikan politik oleh kader Partai Golkar. Dengan peran kader Partai Golkar ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman politik masyarakat mengenai politik. hal tersebut dapat

terlaksana dengan menerapkan strategi pendidikan politik yang sesuai dengan sistem dan visi, misi, serta tujuan Partai Golkar. Strategi tersebut diharapkan membantu memudahkan kader dalam mengajarkan pendidikan politik dan memudahkan masyarakat dalam memahami politik Indonesia.

Di era demokrasi modern seperti sekarang ini, pendidikan politik tidak hanya menjadi pendidikan yang wajib bagi orang yang telah memiliki hak politik. Pendidikan politik adalah pendidikan yang *fleksibel*, artinya mampu dilaksanakan kapan saja, dan dimana saja. Tetapi, pendidikan juga dapat dimasukkan menjadi salah satu materi pendidikan kewarganeraan di sekolah. Branson dalam Budimansyah & Suryadi (2008) menyatakan komponen utama pendidikan kewarganegaraan atau citizenship education mencakup pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), ketrampilan/kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*) dan sikap/watak kewarganegaraan (*civic disposition*). Sehingga dengan adanya materi wajib dari pendidikan kewarganegaraan utamanya mengenai ranah afektif yakni *civic skill* mengenai tentang ketrampilan berpartisipasi dalam politik diharapkan mampu menumbuhkan pemahaman politik bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Tempat penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh data-data yang menunjang penelitian ini. Tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Sragen. Termasuk didalamnya adalah Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Sragen. Waktu penelitian dilaksanakan setelah mendapat perijinan dari pihak yang berwenang. Penelitian ini dilaksanakan selamasembilan bulan (Maret 2014 hingga Juni 2014) yang dimulai dari tahap pengajuan judul, penyusunan proposal, ijin penelitian, pengumpulan data, analisis data sampai pada penyusunan laporan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Hal ini dikarenakan hasil penelitian ini memaparkan obyek yang diteliti berdasarkan fakta. Peneliti berusaha menyajikan data deskriptif berupa keterangan yang didapat dari informan, observasi lapangan serta studi dokumen yang terkait dengan tema penelitian. Data tersebut dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dari penelitian ini.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari informan, tempat, peristiwa, dan dokumen. Teknik

sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Peneliti mengambil sampel dengan memilih kader Partai Golkar dan beberapa masyarakat di Kabupaten Sragen. Dengan demikian akan didapatkan data dan keterangan yang akurat mengenai obyek penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh dan menyusun data penelitian adalah dengan wawancara, observasi serta analisis dokumen. Wawancara dilakukan terhadap informan sesuai dengan sampel yang telah peneliti tentukan yaitu kader Partai Golkar Kabupaten Sragen dan beberapa masyarakat yang tinggal di wilayah Kabupaten Sragen. Observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan kader dan masyarakat yang berkaitan dengan politik dan kewarganegaraan.

Agar validitas data dapat diperoleh, maka digunakan triangulasi data dan triangulasi metode. Cara ini mengarahkan peneliti agar dalam pengumpulan data harus menggunakan beragam data yang tersedia, artinya data yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa sumber yang berbeda. Sumber data penelitian ini berasal dari informanyaitu Sri Indiyah, S.IP selaku Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Partai

Golkar Kabupaten Sragen, Maryono selaku Kepala Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Sragen, Anung Sulistyio selaku Kader Penggerak Teritorial Desa Partai Golkar Kabupaten Sragen dan beberapa warga masyarakat di wilayah Kabupaten Sragen Sutanto, Suparlan, Andi Nurhidayat, Heru Maryono, Darmono, Eko Budianto, Muhammad Isa Anshori, Harianto, Jumbadi serta Keman.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif dengan tahap-tahap sebagai berikut: 1) Pengumpulan Data, 2) Reduksi Data, 3) Sajian Data, 4) Penarikan Kesimpulan atau verifikasi. Adapun prosedur pada penelitian adalah sebagai berikut: 1) Persiapan, 2) Pengumpulan data, 3) Analisis Data, 4) Penyusunan Laporan Penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Pendidikan Politik Politik Partai Golkar

Pendidikan politik merupakan pendidikan yang dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman politik masyarakat. Dalam melaksanakan pendidikan politik dibutuhkan strategi untuk memudahkan pelaksanaan pendidikan politik tersebut. Sebagai agen pendidikan politik kader Partai Golkar juga menerapkan strategi pendidikan politik. strategi pendidikan

politik tersebut merupakan terjemahan dari visi, misi dan tujuan Partai Golkar. Pendidikan politik yang menjadi kewajiban dari kader Partai Golkar harus direncanakan dengan strategi yang baik.

Strategi pendidikan politik yang diterapkan oleh kader Partai Golkar dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat yaitu (1) Pelatihan bagi kader Partai Golkar untuk meningkatkan pengetahuan tentang politik. Strategi ini dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi kader Partai Golkar terhadap politik sebelum mengajarkan pendidikan politik kepada masyarakat. Pelatihan tersebut berguna untuk menyamakan pandangan kader-kader Partai Golkar. (2) Mengajarkan pendidikan politik kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Partai Golkar. Kader Partai Golkar memanfaatkan kegiatan partai untuk melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan politik melalui kegiatan Partai Golkar seperti ini akan dengan mudah menarik minat masyarakat terhadap politik. (3) Menyisipkan pendidikan politik melalui kegiatan sayap partai dan organisasi pendiri Partai Golkar. Partai Golkar merupakan partai dengan organisasi terkait yang cukup banyak, seperti KOSGORO, AMPG, KPPG, HWK dan lainnya. Dengan

banyaknya organisasi terkait tersebut dimanfaatkan Partai Golkar dengan menanamkan pendidikan politik melalui kegiatan organisasi-organisasi tersebut. (4) Menggunakan agenda kampanye pemilu untuk pelaksanaan pendidikan politik dan kampanye politik Partai Golkar. Bagi partai politik, masa pemilihan umum adalah masa intensif untuk melaksanakan pendidikan politik. Hal ini dimanfaatkan oleh Partai Golkar untuk mengajarkan pendidikan politik kepada masyarakat. Karena pada masa tersebut masyarakat membutuhkan informasi lebih untuk menentukan pilihan pada saat pemilihan umum. (5) Mengajarkan pendidikan politik dengan pendekatan personal. Kader merupakan seseorang yang memiliki peran sebagai pelaksana program kerja partai. Kader memiliki intensitas untuk berinteraksi dengan masyarakat cukup banyak. Dengan intensitas inilah kader Partai Golkar menerapkan pendekatan personal dalam mengajarkan pendidikan politik. Karena dengan pendekatan personal materi pendidikan politik akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. (6) membentuk kader tingkat Rukun Tetangga untuk mengajarkan pendidikan politik kepada masyarakat di lingkungan kader. Partai Golkar adalah satu-satunya partai politik di Indonesia yang memiliki struktur

kepengurusan hingga tingkat desa. Dengan demikian basis kader Partai Golkar hingga mencapai tingkat Rukun Tetangga atau RT. Hal ini menjadikan sistem kaderisasi Partai Golkar yang sangat mudah, sehingga siapa saja bisa menjadi kader Partai Golkar. Pembentukan kader hingga tingkat RT inilah yang memudahkan Partai Golkar mengajarkan pendidikan politik kepada masyarakat dan diharapkan dengan kader ini mampu memperluas basis masa Partai Golkar.

Menurut Ramsji Tadjuddin (Ramdlon Naning, 1982: 42) menjelaskan dalam pendidikan politik juga dibutuhkan metode pelaksanaan yang tepat. Metode yang tepat akan mampu membuat materi atau kontens pendidikan politik tersebut menarik untuk dipelajari. Teori tersebut dijadikan dasar oleh partai politik untuk meningkatkan metode pendidikan politik yang tepat sasaran. Dengan metode dan strategi pendidikan politik yang sesuai dengan tujuan partai maka pelaksanaan pendidikan politik akan berjalan dengan baik.

Strategi pendidikan politik yang diterapkan oleh kader Partai Golkar merupakan salah satu cara efektif dalam mengajarkan pendidikan politik. Strategi tersebut sebagai suatu pemikiran *modern* dalam mengajarkan pendidikan politik. Dalam

pelaksanaannya strategi tersebut mampu memudahkan kader partai untuk mengajarkan pendidikan politik dan memudahkan masyarakat menerima materi pendidikan politik.

2. Pelaksanaan Pendidikan Politik Kader Partai Golkar Ditinjau dari Ketrampilan Kewarganegaraan yang Dimiliki Masyarakat

Pendidikan politik memiliki tujuan untuk membentuk masyarakat untuk memahami politik dan memiliki tingkat partisipasi politik yang tinggi. Pelaksanaan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh kader Partai Golkar dengan menerapkan strategi pendidikan politik belum mampu membentuk *civic skill* masyarakat. Hingga saat ini masyarakat Sragen masih dipengaruhi oleh budaya politik *patro-client*. Partisipasi politik masyarakat Sragen masih dipengaruhi oleh perintah ketua kelompok masyarakat, misalnya kepala desa atau ketua RT. Masyarakat belum mampu menentukan sikap politiknya. Antara partisipasi politik yang tinggi yang dimiliki oleh masyarakat Sragen, tidak diimbangi oleh pemahaman masyarakat mengenai politik. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi dimana pendidikan politik yang dilaksanakan oleh kader Partai Golkar belum memberi pengaruh yang signifikan. Masyarakat Sragen belum seluruhnya

mendapatkan pendidikan politik dari kader Partai Golkar.

Masyarakat Sragen lebih banyak mendapat pendidikan politik dari media misal seperti televisi, internet, dan koran serta dari agen pendidikan politik yang lain. Pendidikan politik yang dilaksanakan oleh kader Partai Golkar tidak banyak memberikan andil dalam upaya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai politik. Kader Partai Golkar tidak melaksanakan pendidikan politik secara bertahap, berlanjut dan berkelanjutan. Pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh kader Partai Golkar hanya dilaksanakan beberapa waktu saja.

Menurut Udin S. Winataputra dan Dasim Budimansyah (2007: 188) *Civic skills* mencakup *intellectual skills* (ketrampilan intelektual) dan *participation skills* (ketrampilan partisipasi). Ketrampilan intelektual adalah ketrampilan yang penting bagi terbentuknya warga negara yang berwawasan luas, efektif dan bertanggung jawab antara lain adalah ketrampilan berpikir kritis. Sedangkan ketrampilan berpartisipasi adalah ketrampilan berpartisipasi meliputi ketrampilan berperan aktif untuk ikutserta dalam politik bagi masyarakat. Dengan ketrampilan berpartisipasi masyarakat mampu mengadakan koalisi, kerjasama dan

mengelola politik. Selain itu, ketrampilan ini membantu masyarakat memecahkan masalah politik yang dihadapinya. Ketika masyarakat sudah berhasil memenuhi kriteria mengenai *civic skills* maka dapat dikatakan kader Partai Golkar sudah berperan dalam pembentukan pemahaman masyarakat tentang politik. Sebaliknya, jika masyarakat belum memenuhi kriteria *civic skills* maka peran kader Partai Golkar terhadap membentuk pemahaman masyarakat mengenai politik dan kewarganegaraan belum berhasil. Dari dasar ini lah untuk mengetahui peran kader Partai Golkar dalam pendidikan politik jika ditinjau dari *civic skills* yang dimiliki masyarakat.

Berdasarkan kemampuan *civic skill* yang dimiliki oleh masyarakat Sragen dapat dikatakan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh kader Partai Golkar belum mampu membentuk karakter kewarganegaraan masyarakat. Pendidikan politik yang dilaksanakan oleh kader Partai Golkar tidak dilaksanakan secara bertahap, berjenjang dan berkelanjutan. Masyarakat Sragen belum memenuhi kriteria *civic skill*, yaitu masyarakat yang memiliki partisipasi politik yang didasari oleh pemahaman politik yang baik. Masyarakat Sragen lebih banyak mendapatkan pendidikan politik bari

agen pendidikan politik yang lain. Seperti media masa dan sekolah memberikan peran yang besar dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Kader Partai Golkar belum mampu menanamkan pendidikan politik yang mampu merubah budaya politik masyarakat kearah budaya politik partisipan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan di lapangan dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik suatu kesimpulan guna menjawab rumusan masalah. Adapun kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa strategi pendidikan politik yang dilakukan oleh kader Partai Golkar sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai politik melalui : a) pelatihan bagi kader Partai Golkar untuk meningkatkan pengetahuan tentang politik; b) mengajarkan pendidikan politik kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Partai Golkar; c) menyisipkan pendidikan politik melalui kegiatan sayap partai dan organisasi Partai Golkar; d) menggunakan agenda kampanye pemilu untuk pelaksanaan pendidikan politik dan kampanye

- politik Partai Golkar; e) mengajarkan pendidikan politik dengan pendekatan personal; f) membentuk kader tingkat Rukun Tetangga untuk mengajarkan pendidikan politik kepada masyarakat dilingkungan kader. Strategi yang dilaksanakan oleh kader Partai Golkar merupakan strategi yang diperoleh dari hasil penyesuaian antara kondisi masyarakat Sragen dengan sistem kepartaian Partai Golkar. Kader Partai Golkar memanfaatkan sistem dan keuntungan dimiliki seperti banyaknya organisasi sayap yang dimiliki dan struktural partai untuk membentuk strategi pendidikan politik
2. Masyarakat di Kabupaten Sragen masih pada tatanan masyarakat dengan budaya politik *patro-client*. Masyarakat *patro-client* yang ada pada masyarakat Sragen adalah masyarakat yang partisipasi politik yang cukup baik tetapi partisipasi tersebut tidak diimbangi oleh *intellectual skill* yang baik. Sering kali partisipasi aktif dalam politik tersebut bukan karena inisiatif pribadi, melainkan tekanan atau perintah dari pemimpin masyarakat. Berdasarkan perspektif *civic skills* pendidikan politik yang dilakukan oleh kader Partai Golkar belum mampu

merubah budaya politik masyarakat Sragen dari masyarakat *patro-client* menjadi masyarakat yang memenuhi seluruh aspek kewarganegaraan. Dengan demikian pendidikan politik yang dilakukan oleh kader Partai Golkar belum mampu membentuk *civic skill* masyarakat Sragen. Kader Partai Golkar memang bukan satu-satunya agen pendidikan politik, tetapi dengan akses interaksi yang kuat antara kader Partai Golkar dengan masyarakat seharusnya dapat dijadikan modal utama dalam proses merubah masyarakat kearah masyarakat dengan *intelctual skills* dan *partisipatory skills* yang baik. Masyarakat Sragen lebih banyak mendapatkan pendidikan politik bari agen pendidikan politik yang lain. Kader Partai Golkar belum mampu menanamkan pendidikan politik yang mampu merubah budaya politik masyarakat kearah budaya politik partisipan. Partisipasi politik terlihat cukup baik dari masyarakat Sragen tetapi partisipasi tersebut bukan dari pemahaman politik masyarakat pribadi melainkan tuntutan dari pimpinan kelompok atau ada dorongan dari pihak lain.

IMPLIKASI

Berdasarkan kesimpulan di atas dan jawaban yang telah

dirumuskan, ditambah dengan berbagai fenomena yang dibahas dalam penelitian ini tentang peran kader Partai Golkar Kabupaten Sragen dalam kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat di Kabupaten Sragen sebagai bagian dari pengembangan *civic skill* yang harus dimiliki oleh masyarakat maka implikasi yang ditimbulkan adalah :

1. Strategi pendidikan politik yang dikembangkan oleh kader Partai Golkar dalam upaya meningkatkan pemahaman politik tersebut dapat membantu pelaksanaan pendidikan politik. Dengan menggunakan strategi, pendidikan politik akan lebih tepat sasaran untuk membentuk pemahaman politik masyarakat. Jika setiap partai politik mempunyai strategi dalam melaksanakan pendidikan politik maka pendidikan politik tersebut akan tepat sasaran dan mudah diterima oleh masyarakat. Pendidikan politik yang baik akan memberikan pengaruh yang positif terhadap pola pikir dan perilaku berpolitik masyarakat. Penguatan pola dan perilaku politik masyarakat ini sangat berguna untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem politik maupun sistem pemerintahan. Strategi pendidikan politik yang diterapkan oleh kader Partai Golkar

akan memudahkan masyarakat dalam memahami politik yang terus berkembang seiring perkembangan politik global.

2. Pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Partai Golkar tersebut belum mampu merubah budaya masyarakat Sragen dari budaya politik *patro-client* menjadi budaya politik partisipan. Masyarakat sendiri lebih banyak mendapatkan pendidikan politik dari agen pendidikan politik lain. Jika partai politik belum dapat memberikan pengaruh terhadap pemahaman politik masyarakat, maka yang terjadi adalah tingkatan budaya politik tidak akan meningkat menjadi budaya politik partisipan. Mengingat pentingnya peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik masyarakat. Dengan pendidikan politik yang belum mampu meningkatkan *civic skill* masyarakat akan memberi dampak kepada kurangnya ketrampilan intelektual dan partisipasi masyarakat terhadap politik. Selain itu, dengan mengetahui peran dari kader Partai Golkar dalam pendidikan politik dapat dijadikan dasar untuk memperbaiki peran tersebut.

SARAN

Dari kesimpulan yang telah diketahui, peneliti memberikan saran

sebagai untuk beberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Pemerintah

- a. Pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat diharapkan menjadikan pendidikan politik sebagai salah satu konsentrasi pembangunan, serta adanya pengawasan dan aturan yang baku dalam pelaksanaan pendidikan politik.
 - b. Hendaknya pemerintah membuat aturan dan garis besar mengenai materi pendidikan politik yang wajib untuk diajarkan kepada masyarakat sebagai dasar atau platform pendidikan politik.
 - c. Berhubungan dengan keterbatasan partai dalam melaksanakan pendidikan politik seharusnya pemerintah juga membentuk suatu aturan dan lembaga yang memiliki tugas melaksanakan pendidikan politik.
2. Partai Politik
- a. Setiap partai politik hendaknya memiliki strategi dalam mengajarkan pendidikan politik untuk masyarakat.
 - b. Bagi partai politik khususnya bagi Partai Golkar lebih memperhatikan dan menjadikan pendidikan politik sebagai kegiatan rutin.
 - c. Menjadikan pendidikan politik sebagai penguat persatuan dan

kesatuan bangsa, dan lebih mementingkan kepentingan bangsa dibandingkan kepentingan individu, kelompok, dan golongan partai.

3. Masyarakat

- a. Masyarakat hendaknya banyak belajar pendidikan politik dari berbagai sumber untuk meningkatkan pemahaman tentang politik.
- b. Masyarakat seharusnya aktif dalam partisipasi politik untuk menciptakan peran dan kontrol masyarakat terhadap pemerintah.
- c. Masyarakat diharapkan mampu lebih peka terhadap isu-isu dan masalah politik yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. 1996. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Branson, S. Margaret, et.al. 1998. *The Role of Civic Education, A Forthcoming Education Policy Task Force Position*. Paper from the Communitarian Network, diakses di www.civiced.org.
- Kalidjernih K, Freddy. 2007. *Kamus Study Kewarganegaraan: Perspektif Sosiologis dan Politik*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Kartono, Kartini. 1989. *Pendidikan Politik sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung : Mandar Maju
- Lexy J. Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Naning, Ramdlon. 1982. *Pendidikan Politik dan Regenerasi*. Yogyakarta : Liberty.
- Sukarna. 1981. *Sistem Politik*. Bandung : Alumni
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D Bandung: Alfabeta
- Tim Redaksi. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta : Balai Pustaka.
- Winataputra S. Udin & Budimansyah, Dasim. 2007. *Civic Education Kontek, Landasan Bahan Ajar dan Kultur Kelas*.
- Winarno. 2013. *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan..* Jakarta: Bumi Aksara.
- Yunanto, Sutoro Eko. 2014. *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : APMD Press.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
- Undang-Undang nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Pasal-Pasal dalam UU Nomor 2 Tahun 2008
- Permendagri No.36 tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik menjelaskan sasaran dari Pendidikan Politik
- Permendagri No. 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Partai Politik